

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DI DESA TAROWANG
KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO**

SKRIPSI

Oleh :

**IRWAN JAYA
105-640-183-313**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DI DESA TAROWANG
KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan oleh

IRWAN JAYA

Nomor Stambuk : 105-640-183-313

Kepada

27/03/2021

1 ccg
Smb. Alumni

R/0033/IPM/21 CD
JAY
S'

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH_MAKASSAR**

2021

PENERIMAAN TIM

Telah diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0155/FSP/A.3-VIII/II/42/2020 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Selasa, 23 Februari 2021.

Ketua

Dr.Hj.Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

NBM: 730727

Sekretaris

Dr.Burhanuddin, S.Sos, M.Si

NBM: 1084366

Penguji :

1. Dr. Muhlis Madani, M.Si

2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd

3. Dr. Hafis Elfiansyah P., M.Si

4. Dr. Hj. Sudarmi, M.Si

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Desa Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto

Nama Mahasiswa : Irwan Jaya

No. Stambuk/NIM : 105 640 183 313

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Amir Muhiddin, M.Si


Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd

Mengetahui

**Dekan
Fisipol Unismuh Makassar**

**Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan**



Dr. Hj. Hayani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Nurvanti Mustari S.Ip M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Irwan Jaya

Nomor Stambuk : 105 640 183 313

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 10 Januari 2021

Yang Menyatakan,



IRWAN JAYA

ABSTRAK

IRWAN JAYA. 2021. Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Desa Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. (Dibimbing oleh Dr. Amir Muhidin, M.Si selaku Pembimbing I dan Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd selaku Pembimbing II)

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat secara teoritis yaitu menjadi sumber pengetahuan di instansi pemerintahan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, yang spesifiknya berfokus pada bidang pemerintahan. Dalam penelitian ini merumuskan konsep masalah yang ada pada latar belakang dengan konsep strategi pemerintah desa dalam melakukan kebijakan atas peran meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Tarowang, melalui konsep perencanaan (program), pelaksanaan (implementasi) dan pengawasan (evaluasi). Tercapainya keberhasilan dari pemerintahan dalam kebijakan merupakan wujud keberhasilan dari segala program (perencanaan) yang dikerjakan. Implementasi kebijakan merupakan alat ukur untuk menghitung evaluasi kinerja pemerintah. Mazmanian dan Sabatier menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya. Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil.

Kata Kunci: *Strategi Pemerintahan, Implementasi Kebijakan, Kebijakan Publik*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang memberi ilmu, inspirasi, dan kemuliaan atas kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Desa Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto”

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Drs. Nuryanti Mustari S.Ip M.Si sebagai Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang telah bersedia untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini.
4. Masyarakat Kecamatan Tarowang Desa Tarowang yang telah bersedia untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini.
5. Rekan-rekan IP angkatan 2013, terima kasih untuk persahabatan dan kebersamaan selama ini.

6. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu karena keterbatasan. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmah pada kita semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pendidikan dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan seperti yang diharapkan oleh semua pihak. Semoga Allah Ta'ala selalu membimbing kita semua. Amin.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENERIMAAN TIM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR BAGAN.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Strategi.....	11
B. Pengertian Pemerintah.....	12
C. Pengertian Partisipasi.....	15
D. Pengertian Masyarakat.....	16
E. Definisi Partisipasi Masyarakat.....	18
F. Kerangka Berpikir.....	20
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Objek Penelitian.....	23
B. Jenis Penelitian.....	23
C. Sumber Data.....	23
D. Instrumen Pengumpulan Data	24
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25
F. Teknik Analisis Data.....	25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	27
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	37

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA.....	51
----------------------------	-----------

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pikir.....21



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Jeneponto Berdasarkan Kecamatan.....	9
Tabel 4.2 Luas setiap Jenis Penggunaan Lahan.....	29
Tabel 4.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	33



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Jeneponto.....28



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara yang merdeka, dan kemerdekaan itu dicapai berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta melalui perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat secara seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar Negara dan pedomannya.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih baik dipusat dan daerah sampai pada unsur pemerintahan terendah yaitu di tingkat desa, maka tata kelola pemerintahan yang baik harus menjadi prioritas utama karena merupakan poros dalam mencapai pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dalam mewujudkan kualitas pelayanan pemerintahan yang baik, melalui tata kelola pemerintahan serta sistem kerja pemerintah yang benar maka desa yang merupakan unsur pemerintahan terendah yang berada dibawah kecamatan perlu di laksanakan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan benar.

Sesuai dengan semangat reformasi birokrasi maka setiap lembaga pemerintahan baik pusat dan daerah harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pelayanan tersebut adalah masalah sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam kesempatan ini dipandang sangat penting adanya sebuah mekanisme pembinaan dan pengawasan yang terlaksana secara terukur, sistematis dan berkelanjutan. Sebagai salah satu

entitas penting pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, desa merupakan ujung tombak pembangunan karena kedekatannya dengan masyarakat serta ruang lingkup administrasinya yang sempit. Bertolak dari fakta ini, maka desa sebagai bagian integral dari pemerintah disatu sisi dan juga pada sisi lain, memiliki peran sebagai pelindung entitas lokal, maka sudah sepatutnyalah desa dikelola sesuai dengan asas-asas pemerintahan umum serta mengedepankan asas manfaat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Seiring dengan perkembangan dan perubahan jaman yang dirasakan semakin hari semakin berkembang, tuntutan, harapan dan tanggung jawab yang diembankan kepada pemerintah desa juga semakin meningkat. Tingginya angka pengangguran, rendahnya produktivitas ekonomi daerah/nasional, tingginya jumlah masyarakat urban yang menuju kota untuk mengadu nasib, pada akhirnya telah menyebabkan berbagai gejolak sosial. Hal ini tidak lain disebabkan karena tingginya konsentrasi massa pencari kerja di kota yang tidak berjalan seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia.

Berkaca pada persoalan ini, pemerintah kemudian berinisiatif mengurangi konsentrasi massa pencari kerja di satu titik tertentu dengan jalan mendorong dan memacu pertumbuhan ekonomi di daerah (desa). Dasar pertimbangannya adalah jika ekonomi desa semakin maju maka tentunya masyarakat tidak akan berbondong-bondong meninggalkan desa untuk mengadu nasib ke kota.

Sepintas, niat tersebut terasa sangat mulia karena adanya keinginan pemerintah mendorong pemerataan pembangunan hingga tingkat desa. Aplikasinya kemudian dilaksanakan dengan memberikan otonomi kepada desa

yang disertai dengan sejumlah anggaran pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa. Namun, apabila dicermati lebih jauh, maka kita akan melihat bahwa sebenarnya tuntutan dan harapan yang diberikan kepada pemerintah desa sangat tidak masuk di akal dan tidak terukur.

Kenyataan yang dihadapi pemerintah desa saat ini sebenarnya tidak hanya terletak pada kemampuan anggaran yang dimiliki untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan desa. Permasalahan yang dihadapi desa sejatinya sungguh sangat kompleks. Desa di negeri ini umumnya sangat dekat dengan keterbelakangan dan kemiskinan. Sumber dari segala persoalan ini adalah minimnya sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu menjalankan roda pemerintahan desa sesuai dengan asas-asas pemerintahan umum. Jika desa dipaksakan untuk menjadi pionir sekaligus pelaku perubahan ekonomi, maka tentunya hal ini tidak akan memberikan manfaat optimal dalam mendorong perekonomian daerah.

Pada titik ini, hal utama yang mendesak diperlukan desa adalah bagaimana memutus mata rantai sumber daya manusia yang tidak berdaya dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan desa. Dengan kata lain, pemberian tanggung jawab yang besar dengan sejumlah anggaran yang sangat besar tidak akan pernah memberikan hasil optimal jika sumber daya manusia atau cara pandang aparatur pemerintah desa tidak pernah di tingkatkan.

Pada titik ini, peranan kepala desa, tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa dan partisipasi masyarakat dipandang sangat penting keberadaannya dalam upaya memutus persoalan-persoalan yang terjadi di desa,

seperti kurang mantapnya tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa dalam mencapai tujuan pemerintah secara baik, dengan memfungsikan tugas lembaga penyelenggara pemerintahan desa secara maksimal.

Di dalam mewujudkan pembangunan desa secara maksimal mempunyai tugas yang serius dalam menjalankan roda pemerintahan desa, baik dalam administrasi, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di dalam mewujudkan pemerintahan desa yang profesional. Jika desa tidak dikelola dengan baik maka tentu terdapat banyak masalah yang terjadi dalam proses pemerintahan. Oleh karena itu peranan kepala desa, tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa, dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan dan mengawasi serta memberikan masukan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat mempengaruhi tercapainya sistem pemerintahan desa yang baik dan benar.

Pengaruh kepemimpinan kepala desa, tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa dan partisipasi masyarakat merupakan kemampuan aparat penyelenggara pemerintahan dan peran serta masyarakat secara aktif dalam penentuan dan pengambilan keputusan dalam mencapai sistem penyelenggaraan pemerintahan secara baik dan benar dalam mencapai suatu tujuan bersama.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan upaya Pemerintah desa didalam memberikan pelayanan, pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui pelatihan dan pengawasan kepada aparatur pemerintahan desa dalam melaksanakan sistem pelaksanaan dan pengelolaan pemerintah desa yang baik. Kedudukan kepala desa, sebagai penyelenggara pemerintahan desa

yang diberi kewenangan menjalankan pemerintahan umum, seperti percepatan pembangunan melalui penyediaan sarana-prasarana, dan upaya percepatan pembangunan ekonomi desa yang kokoh dan mandiri.

Pembangunan nasional dilaksanakan secara merata di seluruh tanah air untuk perbaikan taraf hidup yang berkeadilan sosial yang menjadi cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke empat. Di dalam UU No.12 Tahun 2008 mengenai pemerintahan daerah disebutkan bahwa Desa atau dengan nama lain, selanjutnya disebut kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa, pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No. 66 Tahun 2007, "karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara, sedangkan partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Bab VI Pasal 63 tentang perencanaan pembangunan Desa pada ayat 1 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa disusun perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota. Lebih lanjut pada ayat 2 menyatakan bahwa “ perencanaan pembangunan desa sebagaimana pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya”. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan desa diwajibkan untuk melibatkan partisipasi masyarakat desa.

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran atau langsung dalam bentuk fisik, Y Slamet (1994). Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa merupakan program desa untuk pembangunan desa secara berkelanjutan, atau asosiasi global yang melibatkan pihak lembaga pemerintah, LSM maupun sektor swasta, dan masyarakat setempat yang secara bersama-sama bertanggung jawab atas pengelolaan pembangunan desa melalui sarana-sarana fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan.

Penelitian ini mencoba untuk menemukan jawaban terutama pada pertanyaan apakah peran pemerintah desa dalam strateginya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya dalam pembangunan di desa. Penelitian ini akan mengambil lokasi di Desa Tarawang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada

observasi awal yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pembangunan (fisik) di Desa Tarowang sudah terbilang cukup baik. Hal ini dapat ditunjukkan dari kelengkapan fasilitas pelayanan publik diantaranya fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi hingga ketersediaan air bersih. Selain itu, di desa Tarowang juga terdapat Pasar Desa yang dikelola dengan baik sampai dengan sekarang (Monografi Desa Tarowang: 2020). Sementara pembangunan non-fisik juga terbilang cukup baik mulai dari aktifnya kegiatan Posyandu, adanya pengobatan gratis, adanya karnaval budaya, hingga masih terpeliharanya identitas lokal yakni kegotongroyongan warga.

Sedangkan dilihat dari intensitas pertemuan yang diadakan dapat diasumsikan bahwa perencanaan pembangunan di Desa Tarowang sudah cukup melibatkan masyarakat. Pertemuan yang ada di Desa Tarowang dimulai dari tingkat RT sebulan sekali, kemudian tingkat RW dua bulan sekali, hingga tingkat Desa setahun dua kali. Namun, keseimbangan peran pemerintah-masyarakat tentu tidak bisa dilihat hanya dari intensitas pertemuan yang diadakan. Karena ada banyak faktor lain yang menentukan keseimbangan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan di atas bahwa meski pembangunan telah terlaksana cukup baik belum tentu hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat.

Pemerintah desa tarowang telah melakukan berbagai macam kegiatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Namun demikian hasilnya belum sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Masih

rendah partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa disebabkan karena:

1. Kurangnya perhatian pemerintah desa terhadap minimnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Kurangnya kepedulian masyarakat dalam kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa.
3. Masih rendahnya tingkat kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Dengan begitu banyaknya permasalahan dalam pembangunan desa maka diperlukan suatu strategi untuk mengatasinya. Pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Berkaitan dengan hal tersebut partisipasi masyarakat sebagai strategi pendukung untuk mengatasi permasalahan dalam pembangunan desa. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan diharapkan hasil dari pembangunan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh daerah tersebut.

Pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Partisipasi masyarakat merupakan potensi kekuatan dan peluang dalam proses pembangunan yang harus ditingkatkan secara lebih luas. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini mengambil judul **“Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Desa Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan-permasalahan yang muncul antara lain:

1. Bagaimana strategi pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat di Desa Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung Strategi pemerintah Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat di Desa Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat di Desa Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.
2. Untuk memahami faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung upaya pemerintah Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat di Desa Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah (Proposal) ini yang berjudul "Strategi pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat di Desa Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto berguna secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis Secara teoritis sebagai sumber informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai Strategi Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat di Desa Tarowang Kecamatan

Tarowang Kabupaten Jeneponto dan sebagai masukan bagi para peneliti lainnya yang ingin memperluas bidang kajian pada penelitian lanjutan.

2. Secara praktis Sebagai tolak ukur bagi pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Tarowang Dalam Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Strategi

Siagian (dalam Akdon, 2009:130) mendefinisikan strategi sebagai “serangkaian keputusan dan tindakan yang mendasar yang dibuat oleh manajemen dan diimplementasikan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan”. Menurut Andrew (2005), strategi adalah pola keputusan yang menentukan dan mengungkapkan sadaran, maksud atau tujuan dan menghasilkan suatu kebijakan serta merencanakan untuk pencapaian tujuan serta memperinci apa yang ingin dicapai. Strategi merupakan suatu proses yang dalam banyak hal tidak dapat dipisahkan dari struktur, tingkah laku dan kebudayaan dimana ditempat terjadinya proses tersebut. Namun demikian, dari proses tersebut kita dapat memisahkan dua aspek penting yang saling berhubungan erat dalam kehidupan nyata, tetapi dapat dipisah untuk tujuan analisis. Yang pertama adalah perumusan (formulasi) dan yang kedua adalah pelaksanaan (implementasi).

Konsep strategi menurut Wheelen dan Hunger (dalam Amir, 2012:7) adalah sekumpulan keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Dengan strategi, organisasi dimungkinkan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal dengan memanfaatkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan dari lingkungan internal. Namun demikian, proses yang ada memiliki dua aspek penting yang saling berhubungan satu sama lain. Aspek tersebut diperlukan untuk tujuan

analisis. Aspek yang dimaksud adalah perumusan (formulation), dan pelaksanaan (implementation) (Andrew, 2005: 25).

Tahapan demi terwujudnya suatu strategi adalah sebagai berikut:

- a) Tahap perumusan. Tahap pertama diartikan sebagai keseluruhan keputusan-keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang harus dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi di masa depan.
- b) Tahap pemutusan. Tahap ini mencakup pengambilan keputusan terkait dengan semua potensi yang dimiliki.
- c) Tahap pelaksanaan. Tahapan ini mencakup pelaksanaan strategi yang ada dengan menggunakan semua kemampuan yang dimiliki untuk pencapaian tujuan.
- d) Tahap penilaian. Pada tahapan ini dilakukan penelitian atas apa yang sudah dilakukan pada tahap-tahap selanjutnya.

B. Pengertian Pemerintah

Dalam kehidupan sehari-hari secara langsung maupun tidak langsung kita sering berhadapan atau pun berkaitan dengan pemerintahan karena dalam syarat suatu negara harus memiliki Wilayah, Penduduk, Pemerintah dan Pengakuan dari negara lain. Oleh karena itu setiap warga negara di dalam kehidupannya sehari-hari akan berhadapan dengan pemerintahan. Untuk lebih memahami pengertian pemerintahan maka berikut penulis kemukakan pandangan dari beberapa sarjana: Menurut Taliziduhu Ndaraha (2002:74) mengatakan bahwa pemerintahan adalah:

Semua lembaga negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.

Pengertian Pemerintah Menurut Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih (2008 :122), "Pemerintah adalah alat bagi Negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan alat juga, dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan".

Menurut Inu Kencana Syafie. (2003:5) mengatakan bahwa pemerintahan adalah: Lembaga Negara yang melaksanakan pengurusan, pengaturan, pengawasan, kepemimpinan dan kordinasi pemerintahan baik pusat dan daerah maupun antara penguasa dan rakyat dalam berbagai situasi dan gejala pemerintahan diharapkan secara baik dan benar.

Menurut Moh. Kusnardi. dan Bintan R.Saragih (1998:112) mengatakan pemerintahan adalah: alat atau lembaga negara yang menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan perwujudan tujuan yang di tetapkan. Sedangkan Menurut I Wayan Gede Suacana. (2013:39-42) mengatakan pemerintahan sebagai mekanisme kerja yakni aktivitas pemerintahan yang berorientasi pada upaya mewujudkan keadilan sosial, dan pemerintah secara maksimal untuk mampu melaksanakan tiga fungsi dasar yaitu, pelayanan (*service*), pembangunan (*development*) dan pemberdayaan (*empowerment*).

Berbicara mengenai pemerintahan daerah tidak bisa lepas dari pembicaraan pemerintahan pada umumnya. Pemerintah dan pemerintahan mempunyai pengertian yang berbeda. Pemerintah merujuk kepada organ atau alat perlengkapan, sedangkan pemerintahan menunjukkan bidang tugas atau fungsi.

dalam arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Sedangkan dalam arti luas, pemerintah mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan-badan atau lembaga-lembaga, alat perlengkapan negara yang melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara. Dengan demikian pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang terdiri dari lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Menurut Rasyid dalam Supriatna (2007:2) mengatakan bahwa pemerintah mengandung makna pengaturan (UU) mengurus (mengelola) dan memerintah (memimpin) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bagi kepentingan rakyat. Pemerintah mengandung unsur yang secara filosofi berkaitan erat dengan badan pemerintahan yang sah secara konstitusional, kewenangannya untuk melaksanakan pemerintahan, cara dan sistem pemerintahan, fungsi pemerintahan sesuai dengan kekuasaan pemerintah, dan wilayah pemerintahan, selanjutnya membagi tiga kekuasaan pemerintahan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Kepala Desa Dalam Organisasi Pemerintahan Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa yang secara langsung dicalonkan oleh masyarakat setempat ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan, yaitu Bupati/Walikota atas nama Gubernur. Kepala Desa mempunyai tugas yang cukup berat dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara

Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

C. Pengertian Partisipasi

Kata partisipasi adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa *Inggris* yakni *participation*. Adapun dibawah ini akan disebutkan dan dijelaskan satu persatu konsep partisipasi oleh para ahli yang diantaranya adalah sebagai berikut.

Menurut Davis (2000:142) Didalam bukunya beliau menjelaskan bahwa definisi partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang atau individu dalam situasi kelompok yang mendorong dia untuk berkontribusi terhadap tujuan kelompok dan mempertanggung-jawabkan keterlibatannya.

Pengertian lain Partisipasi Djalal dan Supriadi (Yuwono, 2001:201-202). Didalam bukunya beliau menjelaskan bahwa makna partisipasi adalah pembuat keputusan dengan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, bahan, keterampilan, barang dan jasa.

Echols & Shadily (dalam Soetrisno, 2000: 419) Didalam bukunya beliau menjelaskan bahwa pengertian partisipasi adalah suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan di ikut-sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi.

Sumaryadi (2005:46) Didalam bukunya beliau menjelaskan bahwa arti partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan seperti :

- a. Pikiran.
- b. Tenaga.
- c. Waktu.
- d. Keahlian (skill).
- e. Modal (materi).
- f. Ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli dan pakar diatas, jelas sekali bahwa keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan adalah suatu langkah awal guna keberhasilan suatu pembangunan.

D. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang dalam sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata *society* berasal dari bahasa latin, *societas*, yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. *Societas* diturunkan dari kata *socius* yang berarti teman, sehingga arti *society* berhubungan erat dengan kata sosial.

Secara implisit, kata *society* mengandung makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama. Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, *musyarak*. Secara abstrak, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk

mengacu pada sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

Masyarakat sering diorganisasikan berdasarkan mata pencaharian utamanya. Pakar ilmu sosial mengidentifikasi berbagai tipe masyarakat, seperti masyarakat pemburu, masyarakat pastoral nomadis, masyarakat bercocok tanam, dan masyarakat agrikultural intensif (masyarakat peradaban). Sebagian pakar menganggap masyarakat industri dan pasca-industri sebagai kelompok masyarakat yang terpisah dari masyarakat agrikultural tradisional.

Masyarakat dapat pula diorganisasikan berdasarkan struktur politiknya: berdasarkan urutan kompleksitas dan besar, terdapat masyarakat *band*, suku, *chiefdom*, dan masyarakat negara. Untuk menganalisis secara ilmiah tentang proses terbentuknya masyarakat sekaligus masalah-masalah yang ada sebagai proses-proses yang sedang berjalan atau bergeser kita memerlukan beberapa konsep. Konsep-konsep tersebut sangat perlu untuk menganalisis proses terbentuk dan tergesernya masyarakat dan kebudayaan, serta dalam sebuah penelitian antropologi dan sosiologi yang disebut dinamika sosial (*social dynamic*). Konsep-konsep penting tersebut antara lain:

- a. Internalisasi (*internalization*)
- b. Sosialisasi (*socialization*)
- c. Enkulturasasi (*enculturation*).

E. Defenisi Partisipasi Masyarakat

Menurut Slamet (dalam Suryono 2001:124) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan.

Sedangkan Menurut Josef Riwu Kaho (1988:123) mengatakan bahwa Partisipasi masyarakat merupakan: kegiatan warganegara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah yang merupakan pemenuhan terhadap etika politik yang sedang berlangsung dan merupakan bagian dari bentuk demokrasi. Partisipasi masyarakat yang tinggi akan berpengaruh terhadap suatu program pembangunan. Hal ini dimungkinkan karena pembangunan bukan saja ditentukan segalanya oleh penyelenggara pembangunan, tetapi partisipasi masyarakat juga turut memberikan andil dalam tercapai atau tidaknya suatu program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.

Dengan adanya partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun untuk itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana/program pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingannya), dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara terarah dan serasi terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan berjalan secara efektif dan efisien.

1. Strategi pemerintah daerah dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

a. Perencanaan

Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan (Siagian, 2003, hal. 88)

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembangunan, karena demi suksesnya pembangunan dan pencapaian hasil yang baik membutuhkan perencanaan yang matang untuk mendukung keberhasilan tersebut. Partisipasi masyarakat melalui perwakilannya dalam hal perencanaan diwujudkan dalam sebuah forum seperti rapat musyawarah yang membahas tentang rencana atau program-program yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

b. Pelaksanaan

Partisipasi ini diwujudkan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa, seluruh masyarakat hendaknya dilibatkan dalam setiap agenda pembangunan yang dilaksanakan di desanya tanpa kecuali, evaluasi pelaksanaan pembangunan maupun dalam kegiatan pekerjaan perbaikan hasil dari pembangunan tersebut.

Pembangunan yang dimaksud disini mencakup pembangunan fisik desa tersebut. Pembangunan fisik disini berupa pembangunan fasilitas-fasilitas maupun sarana dan prasarana yang ada di desa.

c. Pengawasan

Pengawasan ialah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2007, hal. 112).

Kegiatan pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan yang sedang dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Di dalam pembangunan desa, kegiatan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkat desa sebagai pemerintah desa, tetapi juga dilakukan oleh seluruh masyarakat desa selaku pelaksana pembangunan.

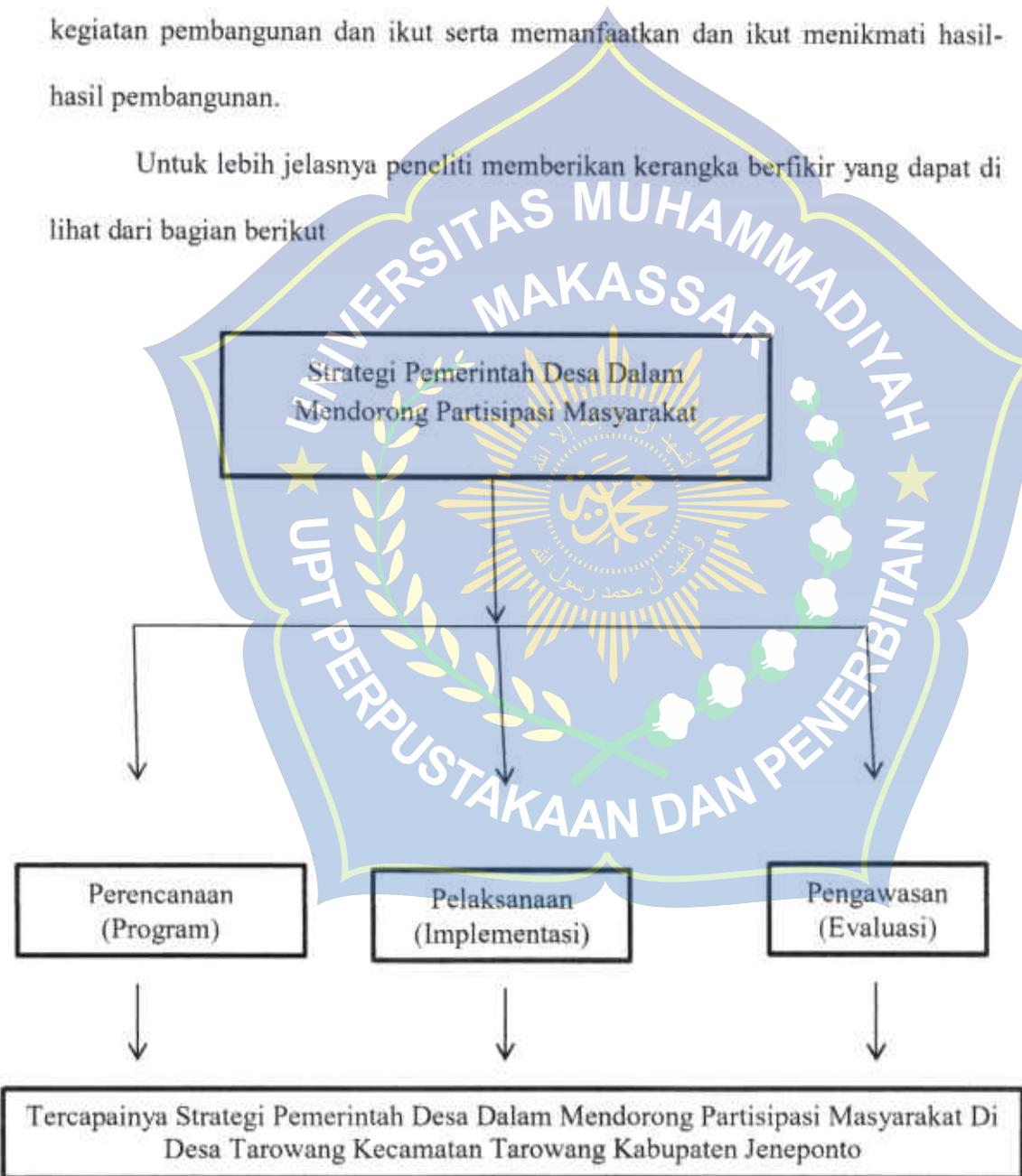
Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa dalam jenis-jenis dalam partisipasi masyarakat secara umum ada 3 (tiga) macam yaitu (1) partisipasi masyarakat pada perencanaan program, adalah keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan program. Contoh kegiatan pada pertemuan masyarakat, musawarah desa, dll. (2) Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program adalah keikutsertaan masyarakat pada penerapan atau pelaksanaan program. Contoh kegiatan yaitu partisipasi uang, tenaga, maupun pikiran. (3) Partisipasi masyarakat pada evaluasi, adalah keikutsertaan masyarakat dalam menilai dan mengawasi kegiatan.

F. Kerangka Berfikir

Strategi pemerintah desa dalam partisipasi masyarakat merupakan sebuah konsep baik untuk menjadikan wadah pedesaan yang lebih baik terutama dalam

pembangunan desa dan lain lainnya. Dalam meningkatnya partisipasi masyarakat dapat memberikan kepuasan tersendiri karena salah satunya di bidang pembangunan, sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan.

Untuk lebih jelasnya peneliti memberikan kerangka berfikir yang dapat di lihat dari bagian berikut



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap data yang diambil. Untuk menyamakan pemahaman dan cara pandang terhadap karya ilmiah ini, maka penulis akan memberikan penjelasan mengenai maksud dan deskripsi fokus penelitian terhadap penulis karya ilmiah ini.

Deskripsi fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka berfikir. Deskripsi fokus penelitian ini mengacu pada teori Siagian, SP. (2007), yakni sebagai berikut:

- a) Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan (Siagian, 2003, hal. 88)
- b) Pelaksanaan merupakan partisipasi ini diwujudkan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa, seluruh masyarakat hendaknya dilibatkan dalam setiap agenda pembangunan yang dilaksanakan di desanya tanpa kecuali, evaluasi pelaksanaan pembangunan maupun dalam kegiatan pekerjaan perbaikan hasil dari pembangunan tersebut. Pembangunan yang dimaksud disini mencakup pembangunan fisik desa tersebut. Pembangunan fisik disini berupa pembangunan fasilitas-fasilitas maupun sarana dan prasarana yang ada di desa.
- c) Pengawasan ialah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2007, hal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Objek Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto dan yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan para perangkat Desa Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Dalam suatu penelitian biasanya menggunakan jenis penelitian tertentu yang dianggap paling sesuai oleh peneliti sehingga untuk mengklasifikasikan suatu penelitian menjadi lebih mudah. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

C. Sumber Data

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa data primer merupakan data utama yang didapatkan langsung dari apa yang diteliti.

Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu melakukan kosiuner/wawancara dengan tujuan untuk memperoleh data dari responden dimana yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa dan Masyarakat.

2. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya peneliti harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen data itu diperoleh dengan menggunakan literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah penelitian yang dihasilkan dari hasil objek yang mendukung data primer yaitu Perangkat Desa Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.

D. Instrumen Pengumpulan Data

Alat instrumen dalam pengumpulan data yang harus betul-betul direncanakan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris sebagaimana adanya sebab penelitian akan berhasil apabila banyak menggunakan instrument agar data tersebut dapat menjawab pertanyaan. Penulis menggunakan beberapa teknik pedoman observasi, wawancara dan angket.

1. Pedoman Observasi

Metode observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai gejala-gejala yang terjadi untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi diartikan sebagai usaha mengamati fenomena fenomena yang akan di selidiki baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung dengan mengfungsikan secara latin dari pengamatan untuk mendapatkan informasi dan data akan diperlukan tanpa bantuan dan alat lain. Sedangkan Observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat

berlangsungnya peristiwa yang akan diselidiki, misalnya peristiwa tersebut di amatimelalui film, rangkaian slide, atau rangkaian photo.

Dalam menggunakan teknik observasi baik langsung maupun tidak langsung diharapkan mengfungsikan setiap alat indra untuk mendapatkan data yang lengkap.

2. Pedoman Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi antara responden untuk menemukan informasi atau keterangan dengan cara langsung, bertatap muka dan bercakap-cakap secara lisan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang menghubungkan dengan informasi yang diperlukan dengan jarak yang dibutuhkan secara lisan pula, memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya Jawab sambil bertatap muka antara sipenanya dan atau pewawancara dengan sipengaruh atau responden yang menggunakan alat panduan wawancara.

3. Catatan Dokumentasi

Dokumentasi yaitu, peninggalan tertulis dalam berbagai kegiatan atau kejadian yang dari segi waktu *relative*, belumterlau lama dan teknik pengumpulan data dengan hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen agenda dan sebagainya. Dalam hal ini penulis menggunakan catatan dokumentasi untuk memperkuat hipotesa agar hasil penelitian yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun Fokus Penelitian Dari paparan di atas dan berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini yakni Strategi Pemerintah Desa Dalam Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: Riset lapangan, yaitu cara penghitungan data dengan penulis langsung turun ke lapangan. Dalam hal ini di Desa Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto guna mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan proposal ini. Oleh karena itu data yang dikumpulkan ini bersifat empiris. Kemudian dalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.
2. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yaitu semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.
3. Dokumentasi adalah mencatat semua data secara langsung dari referensi yang membahas tentang objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Pada tahapan ini data yang telah dikumpulkan baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, terlebih dahulu diolah kemudian dianalisis. Dalam pengolahan analisis data ini, dipergunakan beberapa metode, yaitu:

Metode Induktif, yaitu suatu metode penulisan yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus dan hasil analisa tersebut dapat dipakai sebagai kesimpulan yang bersifat umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian ini terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Di sisi lain pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat dan kondisi pemerintahan daerah sebagai objek penelitian.

Kabupaten Jeneponto dengan ibu kota Bontosunggu sebagai salah satu sentra produksi garam di Sulawesi Selatan, terletak 91 Km di sebelah selatan Makassar (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan) dengan luas wilayah 749,79 Km² atau 74.979 Ha, yang secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan dan 113 Desa/Kelurahan. Kabupaten Jeneponto berbatasan dengan:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Takalar.

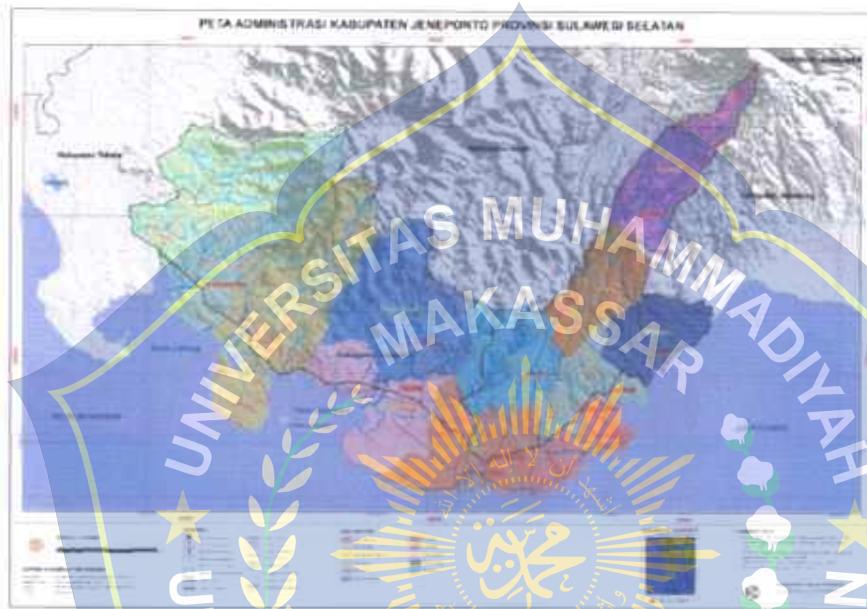
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng.

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar

Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores.

Kabupaten Jeneponto dengan letak geografis 5°23'12" - 5°42'1,2" Lintang Selatan (LS) dan 119°29'12" - 119°56'44,9" Bujur Timur (BT) dengan posisi

strategis dan aksesibilitas yang tinggi, sehingga memiliki peluang pengembangan ekonomi melalui keterkaitan wilayah khususnya keterkaitan dengan daerah yang mendukung pembangunan sosial ekonomi dan budaya.



Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Jeneponto

Secara administratif Kabupaten Jeneponto terbagi atas 11 (sebelas) Kecamatan yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) kelurahan dan 82 (delapan puluh dua) desa. Kecamatan Bangkala Barat merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Jeneponto yakni 152,96 km² atau 20,40% dari luas wilayah Kabupaten Jeneponto, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Arungkeke dengan luas 29,91 km² atau 3,99% dari luas wilayah Kabupaten Jeneponto. Sedangkan desa/kelurahan terluas adalah Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat dengan luas 44 km² dan desa/kelurahan luas wilayah terkecil adalah Desa Pa'rasangang Beru Kecamatan Turatea dengan luas 1,57 km².

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Jeneponto Berdasarkan

Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
1	Bangkala	121,82	16,25
2	Bangkala Barat	152,96	20,40
3	Tamalatea	57,58	7,68
4	Bontoramba	88,30	11,78
5	Binamu	69,49	9,27
6	Turatea	53,76	7,17
7	Batang	33,04	4,41
8	Arungkeke	29,91	3,99
9	Tarowang	40,68	5,43
10	Kelara	43,95	5,86
11	Rumbia	58,30	7,78
	Total	749,79	100

Sumber Data : BPS Kabupaten Jeneponto 2020

1. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu dari 24 (dua puluh empat) daerah kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Selatan. Secara astronomis terletak antara 5°23'12" - 5°42'1,2" Lintang Selatan (LS) dan 119°29'12" - 119° 56' 44,9" Bujur Timur (BT).

Dilihat dari bentang alamnya secara makro, Kabupaten Jeneponto memiliki posisi geostrategis, dimana :

- a. Kabupaten Jeneponto memiliki morfologi wilayah yang komplit, meliputi bagian utara terdiri dari dataran tinggi dan bukit-bukit yang membentang dari barat ke timur dengan ketinggian 500 sampai dengan 1.400 meter diatas permukaan laut, bagian tengah meliputi wilayah-wilayah dataran rendah dengan ketinggian 100 sampai dengan 500

meter diatas permukaan laut dan bagian selatan meliputi wilayah-wilayah dataran rendah & Pesisir dengan ketinggian 0 sampai dengan 100 meter di atas permukaan laut. Hal ini dapat mengundang tumbuhnya investasi berbasis potensi wilayah pada masing-masing zona.

- b. Kabupaten Jeneponto terletak di Ujung Selatan Jazirah Pulau Sulawesi (Tumit dari Kaki Pulau Sulawesi) yang berhubungan langsung dengan Laut Flores yang merupakan salah satu jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dengan panjang pantai 114 kilometer yang difungsikan untuk pelayaran dari Laut Sulawesi melintasi Selat Makasar, Laut Flores, dan Selat Lombok ke Samudera Hindia, dan sebaliknya, sehingga sangat memungkinkan dibangun pelabuhan untuk menopang pelabuhan induk di Makassar jika terjadi kepadatan, pengembangan industri berbasis pantai, kelautan dan perikanan serta pengembangan pariwisata maritim.
- c. Kabupaten Jeneponto berada pada posisi pertengahan jalur lalu lintas angkutan moda transportasi darat untuk orang dan barang antar wilayah selatan Sulawesi Selatan dan berjarak 91 km dari pusat ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini sangat memungkinkan tumbuhnya pengembangan destinasi wisata alternatif yang dapat dipaketkan dengan destinasi wisata yang sudah terkenal di kabupaten lain di wilayah selatan.

2. Tipe Iklim dan Curah Hujan

Kabupaten Jeneponto memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi antara Bulan November sampai Bulan April, sedangkan musim kemarau terjadi antara Bulan Mei sampai dengan Bulan Oktober. Kabupaten Jeneponto beriklim tropis dengan tipe iklim D3, E4 dan C2. Dengan rincian sebagai berikut: (1) Tipe iklim D3 dan E4 meliputi seluruh wilayah kecamatan, kecuali wilayah kecamatan Kelara bagian utara. Tipe iklim ini mempunyai bulan kering secara keseluruhan 5-6 bulan sedang bulan basah berkisar 1-3 bulan. (2) Tipe iklim C2, yaitu tipe iklim yang memiliki bulan basah 5-6 bulan dan bulan lembab 2-4 bulan. Tipe iklim ini dijumpai dengan ketinggian 700-1727 meter dpl yaitu pada wilayah Kecamatan Kelara dan Rumbia. Jumlah rata – rata curah hujan pertahun di Kabupaten Jeneponto selama 5 (lima) tahun terakhir mencapai 1.535 mm dengan rata – rata hari hujan 92 hari. Curah hujan tertinggi jatuh pada bulan Januari dan Februari sedang curah hujan terendah yakni pada bulan Juli, Agustus, dan September.

Iklim (pola distribusi dan jumlah curah hujan tahunan) Kabupaten Jeneponto tergolong kering di hampir semua kecamatan, selain Kecamatan Rumbia, Kelara dan sebagian Kecamatan Bangkala, yang tergolong agak basah. Kondisi iklim seperti ini mengindikasikan bahwa produktifitas berbagai jenis komoditas pertanian di Kabupaten Jeneponto akan menghadapi potensi kekurangan air. Berdasarkan data curah hujan yang diperoleh dari stasiun pencatat hujan tersebut, maka tipe iklim Kabupaten

Jenepono termasuk type iklim agak basah sampai kering. Terdapat 2 type iklim di Kabupaten Jenepono berdasarkan klasifikasi iklim oleh Oldeman yakni Type iklim D3 berkisar 3 sampai 4 bulan basah dan 5 sampai 6 bulan kering. Sedangkan type iklim C2 berkisar 5 sampai 6 bulan basah dan 2 sampai 4 bulan kering.

Dimana pada stasiun Loka, Malakaji dan Beseloro termasuk iklim agak basah sedangkan pada stasiun Allu, Balangloe, Jenepono, dan Takalar termasuk tipe iklim agak kering sampai kering.

Adapun Kondisi curah hujan wilayah ini yang diwakili oleh data dari 7 stasiun pencatat hujan yaitu, Allu, Balangloe, Jenepono, Bisoloro, Loka, Malakaji dan Takalar adalah curah hujan 2086 mm/tahun sekitar 41,51%, sedangkan curah hujan 2615 mm/tahun dengan luasan paling sedikit, hanya sekitar 3,05% dari luas total wilayah Kabupaten Jenepono

3. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan pada wilayah Kabupaten Jenepono berdasarkan hasil analisis spasial tahun 2018 terdiri dari danau, hutan bakau/mangrove, hutan rawa/gambut, hutan rimba, padang rumput, pasir, perkebunan, permukiman dan tempat kegiatan, rawa, sawah, sawah tadah hujan, semak belukar, sungai, tambak, tanah gosong/gundul, tegalan/ladang, dan tubuh air. Peta penggunaan lahan eksisting di wilayah Kabupaten Jenepono, Jenis penggunaan lahan dengan persentase luas terbesar di wilayah Kabupaten Jenepono berupa tegalan/ladang sekitar 46,73% dari luas total wilayah kabupaten.

Jenis penggunaan lahan terbesar kedua adalah sawah seluas 30,70. Areal permukiman dengan lahan pekarangan yang dimiliki, umumnya ditanami dengan tanaman pekarangan seperti mangga, srikaya, dan kelapa, sedangkan areal yang teridentifikasi sebagai lahan semak belukar/alang-alang, banyak dimanfaatkan untuk pertanaman jagung, terutama dimusim hujan. Untuk lahan kebun dan lahan kering lainnya, komoditas utama yang banyak dijumpai adalah jambu mete, mangga, atau ditumbuhi dengan tanaman lontar (*Borassus flabellifer* L.).

Secara administratif, areal sawah menyebar di semua kecamatan, dengan proporsi terbesar berada di Kecamatan Binamu, yakni 3.180 ha atau sekitar 13% dari luas total sawah irigasi yang ada di kabupaten Jeneponto. Sedangkan Kecamatan Kelara memiliki luas areal sawah irigasi dengan proporsi terkecil, yakni 522,85 ha atau sekitar 2,15%.

Tabel 4.2 Luas Setiap Jenis Penggunaan Lahan Kabupaten Jeneponto

Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Luas %
Danau/Situ	0,53	0,00
Hutan Bakau/Mangrove	4,91	0,02
Hutan Rawa/Gambut	31,63	0,04
Hutan Rimba	4.871,47	6,15
Padang Bumput	1,69	0,00
Pasir/Bukit Pasir Laut	42,11	0,05
Perkebunan/Kebun	1.380,92	1,74
Permukiman dan Tempat Kegiatan	3.255,56	4,11
Rawa	18,26	0,02
Sawah	24.327,00	30,70
Sawah Tadah Hujan	329,80	0,42
Semak Belukar	5.792,73	7,31
Sungai	181,25	0,23
Tambak	1.880,33	2,38
Tanah Kosong/Gundul	39,83	0,05
Tegalar/Ladang	37.032,22	46,73
Tubuh Air	42,96	0,05
Total	79.252,23	100

Sumber Data: Fakta & Analisa Revisi RTRW Kab. Jeneponto 2018

4. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan Wilayah Kabupaten Jeneponto diarahkan dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jeneponto.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kabupaten Jeneponto termasuk dalam tahapan pengembangan baru untuk Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Nasional dengan Kategori Pengembangan/Peningkatan fungsi. Sementara itu dalam Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sulawesi, posisi Kabupaten Jeneponto baik dalam kebijakan struktur maupun pola ruang adalah sebagai berikut :

- a) Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Pulau Sulawesi dimana Jeneponto termasuk di dalamnya dengan mendorong pengembangan kotakota sebagai pusat pelayanan sekunder;
- b) Pembangunan jaringan Jalan dengan prioritas sedang yang menghubungkan kota-kota Makassar–Sungguminasa–Takalar–Jeneponto Bantaeng Bulukumba;
- c) Pelabuhan Regional di Jeneponto dengan prioritas sedang;
- d) Pembangunan bendungan-bendungan baru dan embung-embung besar dengan prioritas tinggi : Kelara-Kareloe di Kabupaten Jeneponto ;
- e) Pengembangan Kawasan Agropolitan;

Demikian pula dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Sulawesi Selatan, menempatkan Kabupaten Jeneponto sebagai daerah yang strategis sebagai penyangga pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto Tahun 2011-2031 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2012, telah dirumuskan rencana pengembangan wilayah Kabupaten Jeneponto untuk 20 tahun ke depan. Rencana pengembangan wilayah dimaksud dituangkan dalam bentuk rencana struktur ruang, rencana pola ruang, rencana kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang dan arahan pengendalian ruang.

Rencana struktur ruang Kabupaten Jeneponto terdiri dari pusat-pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya. Sedangkan rencana pola ruang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya.

5. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non fisik suatu daerah yang direpresentasikan oleh tiga dimensi, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kualitas hidup yang layak. Dengan pengukuran IPM ini, setidaknya ada 3 manfaat yang diperoleh, diantaranya adalah: IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), IPM dapat menentukan peringkat atau level

pembangunan suatu wilayah/Negara. IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Sejak tahun 2010 BPS telah menggunakan metode baru dalam penentuan IPM. Perubahan tersebut mencakup data yang digunakan dan metode perhitungan. Dengan mengganti angka melek huruf dengan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Sementara itu dari sisi pendapatan PNB per kapita menggantikan PDB per kapita karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Selain itu dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Hal tersebut menunjukkan dalam mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Tabel 4.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jeneponto dan Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jeneponto	60.55	61.45	61.61	61.81	62.67
2	Sulawesi Selatan	67.92	68.49	69.15	69.76	70.34

Sumber Data: BPS Kabupaten Jeneponto 2018

Dari data pada tabel tersebut di atas, indeks pembangunan manusia di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2017 62,67 persen masih berada 7,67 persen di bawah rata-rata Indeks pembangunan manusia Sulawesi Selatan

yang berada pada 70,34 persen. Sementara perbandingan capaian IPM antara Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan langkah baru untuk membenahi penyelenggaraan pemerintah, melalui otonomi dan desentralisasi yang diharapkan mampu melahirkan partisipasi aktif masyarakat dan menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran dalam meningkatkan kualitas masyarakat dalam partisipasinya membangun daerah ataupun Desanya secara efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam menentukan skala prioritas kebutuhan pembangunan di masyarakat, penyaringan aspirasi diawali dari masyarakat desa/kelurahan dalam forum Musbangdes kemudian akan ditindak lanjuti dengan kegiatan Musrenbang di tingkat kecamatan. Hasil musrenbang kecamatan akan disampaikan Dinas terkait untuk diadakan evaluasi tentang kelayakan teknis dan dibahas/ditetapkan dalam Musrenbang Kabupaten sebagai rencana definitif.

Strategi pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal kebijakan ataupun pembangunan daerah, peran masyarakat Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan kegiatan pembangunan sehingga akan mengarah pada visi dan misi Kabupaten Jeneponto. Dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan sistem dan menjalin koordinasi yang lebih efektif dengan instansi/Dinas/Bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Jeneponto.

1. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Dalam perencanaannya, pemerintah desa tarowang melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya dalam pembangunan desa Tarowang. Salah satu upaya yang dilakukan yakni strategi dan arah kebijakan disusun berdasarkan visi dan misi Kabupaten Jeneponto. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana, diperlukan strategi yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, peran pemerintah desa atau kepala desa sangat di perlukan.

Partisipasi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan merupakan suatu komponen yang harus ada dalam partisipasi masyarakat tersebut supaya partisipasi masyarakat dapat berjalan dengan baik, dan memberikan hasil yang diharapkan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan hasil dari pembangunan tersebut.

Keberhasilan pembangunan desa tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat, oleh sebab itu perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sebuah desa. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Rifai selaku ketua RT.01 Desa Tarowang :

Perencanaan dalam pembangunan desa di Desa Tarowang dalam pengelolaan Keuangan Desa yang didalamnya terdapat ADD (Anggaran Dana Desa) yang melibatkan masyarakat desa melalui rapat yang dilaksanakan pada tingkat RT dan RW, dimana masyarakat sering menyebutnya "Musrenbangdes". (Musyawarah Pembangunan Desa). Hal yang dibahas dalam rapat yang dilakukan di Balai Desa Tanggal 14 Oktober 2019 meliputi permasalahan di tingkat lingkungan RT dan RW saja, salah contohnya adalah adanya pembangunan gedung desa, pembangunan talut dan gorong-gorong atau selokan yang tersumbat di lingkungan RT. Pada tahap perencanaan masyarakat juga mengusulkan solusi dari masalah yang ditemukan. Selanjutnya usulan masalah tersebut dibawa oleh perwakilan RT/RW ke tingkat Musyawarah Desa agar masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan mendapatkan solusinya. Rapat tersebut dihadiri oleh perangkat desa, kepala lingkungan dan ketua-ketua RT (Wawancara bapak Rifai selaku ketua RT.01 Desa Tarowang 21 Januari 2020).

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan/Kota hingga tingkat Provinsi Dan Pusat/Nasional. Penelitian ini difokus pada musrenbang Kelurahan/Desa. Pada pelaksanaan kegiatan musrenbang terdapat proses

dilaksanakan berperdoman dari petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Desa Tarowang pada tahun 2020. Berdasarkan berita acaranya, Musrenbang desa Tarowang dilaksanakan pada hari Selasa, 18 Oktober pukul 09.00 WIB – Pukul 13.00 WIB bertempat di balai desa Tarowang. Acara ini di hadirin oleh aparat desa, tokoh masyarakat, BPD. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan juga dapat dibuktikan dengan menunjukkan bukti daftar hadir masyarakat Desa Tarowang.

Tingkat partisipasi masyarakat desa Tarowang cukup baik, namun, masyarakat tidak melaksanakan pada tahap pra dan pasca Musrenbang dikarenakan masyarakat lebih memilih untuk langsung saja pada acara inti musyawarah yang diadakan dibalai desa Tarowang. Adapun yang terjadi di Desa Tarowang hanya dititik beratkan pada aspek pelaksanaan saja sehingga tahapan pra dan pasca musrenbang cenderung tidak terlalu dianggap penting. (Wawancara, Kepala Desa Tarowang 21 Januari 2020).

Tahun 2019 sendiri perencanaan penggunaan ADD di Desa Tarowang masih terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, seperti pembangunan jalan desa, gorong-gorong dan puskesmas. Pada tahap perencanaan sejauh ini dapat dilihat dalam dua sudut pandang yakni yang pertama pemerintah desa dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan mengajak masyarakat berdiskusi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan desa yang terdapat di ADD, yang kedua perencanaan pengelolaan

ADD di Desa Tarowang masyarakat ikut serta dalam menggali potensi yang dimiliki.

Untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Mulyorejo 1 bentuk partisipasinya yaitu masyarakat ikut sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat memberi masukan/solusi terhadap masalah pelaksanaan yang timbul dalam pembangunan desa.

Kita bisa melihat bahwa segala perkara dunia dalam suatu pembangunan maupun urusan lainnya hendaklah dimusyawarahkan begitu halnya perencanaan pembangunan yang ada di Desa Tarowang hendaklah dimusyawarahkan terlebih dahulu sebelum hendak mengambil keputusan agar apa yang direncanakan bisa dijalankan dengan baik dan nantinya tidak akan ada kesalahfahaman satu dengan yang lainnya.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan merupakan suatu komponen yang harus ada dalam partisipasi masyarakat tersebut supaya partisipasi masyarakat dapat berjalan dengan baik, dan memberikan hasil yang diharapkan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan hasil dari pembangunan tersebut. Untuk menggerakkan warga dalam berpartisipasi dalam pembangunan sangatlah mudah, kesadaran berpartisipasi ini di dorong adanya kesadaran akan pentingnya bekerjasama dalam menyongsong pembangunan. Yang mana dengan adanya gotong-royong dalam menjalankan

program pembangunan di desa Tarowang, lambat laun manfaatnya akan dirasakan oleh warga juga.

Dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan warga masyarakat sendiri sangat menyambut baik akan beberapa program yang dicanangkan oleh pemerintahan setempat. Namun, program tersebut diimbangi dengan pelaksanaan yang maksimal, seperti hadirnya saat rapat atau agenda yang telah disepakati. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh dalam pelaksanaan sebuah program kelembagaan masyarakat. Salah satunya adalah program pelaksanaan pembangunan yang berupa pembuatan talut, gorong-gorong, perbaikan ifrastruktur baik jalan maupun pembangunan desa. Dalam rapat tersebut warga telah menyambut baik akan terlaksanakan program pembangunan yang dinantikan saat ini juga. Dalam sebuah proses perkembangan suatu program kegiatan tentu harus ada selalu pendampingan, agar program yang berjalan selalu terkontrol dalam proses pelaksanaanya.

Dalam hal ini maka dibutuhkan motivasi dan dorongan dari pemerintahan desa juga agar tidak terjadinya suatu kelemahan dalam berpartisipasi masyarakat. Pemerintahan desa seharusnya selalu mengontrol untuk memberikan sosialisasi dan dorongan terhadap kegiatan apa yang sedang dikerjakan dan mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dikerjakan. Pemahaman dari pemerintahan desa tentu akan menjadi motivasi tersendiri bagi warga masyarakat.

Hal ini diungkapkan oleh seorang tokoh masyarakat yaitu Bapak Arifin, tokoh masyarakat " Kami ini menginginkan jalan-jalan antar desa diperbaiki

seperti sekarang ini, Ya... walaupun masih batu kan sudah enak dan tidak becek lagi. Kepala Desa Tarowang mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat sangatlah penting dan hal yang sangat membanggakan ialah pembangunan-pembangunan yang sudah terlaksana karena pada tahun-tahun sebelumnya jalan-jalan masih parah (berlubang), kami ya... bersyukur Alhamdulillah karna sudah bagus walaupun masih banyak kekurangannya.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pembangunan Desa

Kegiatan pengawasan ataupun pemantauan dalam program pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuan dapat tercapai seperti yang diharapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mubarak selaku kepala Desa Tarowang, bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan iya mengatakan,

Yang melakukan pengawasan ataupun pemantauan dan evaluasi adalah aparat Desa Tarowang bersama dengan ketua Pelaksana Program Pembangunan Desa Tarowang. Namun masyarakat juga ikut terlibat didalam pemantauan dan evaluasi, sehingga dengan begitu kami mengetahui apa saja kendala-kendala yang muncul saat pelaksanaan pembangunan yang desa dijalankan. (Wawancara Kepala Desa 21 Januari 2020).

Senada dengan hal itu, Bapak Santoso juga berpendapat bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan di Desa Tarowang ini:

Masyarakat juga ikut melakukan pemantauan dan evaluasi, walaupun masyarakat yang tidak ikut dalam pelaksanaannya, akan tetapi masyarakat

sebagian melakukan pemantauan dari depan rumah sambil ngopi, dan santai”(Wawancara Bapak Santoso 23 Januari 2020).

Selain itu hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Dedi dan Bedu selaku Tokoh masyarakat dan aparatur Desa Tarowang, berikut ungkapan Bapak Dedi:

“Iya kami juga melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan, karena memang pemantauan ini perlu mbak, untuk melihat kesesuaian hasil pembangunan dengan apa yang sudah kami rencanakan bersama masyarakat” (Wawancara Bapak Dedi 23 Januari 2020).

Ternyata bapak Bedu memotong ungkapan diatas, terkait dengan hal itu, bapak Bedu mengatakan:

“Iya tentu, kami melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur tersebut, kami pantau dalam pelaksanaannya seperti apa dan bagaimana, karena kami juga takut nantinya berbeda antara perencanaan dan hasil yang nanti akan kita nikmati bersama masyarakat”. (Wawancara Bapak Bedu 23 Januari 2020).

Keterlibatan masyarakat terhadap Pengawasan Pemerintah Desa terhadap pembangunan infrastruktur seperti pembangunan kantor Desa, Pembuatan Talut dan pengerasan jalan yang ada di Desa Tarowang adalah berikut hasil wawancara peneliti dengan bapak Anto, berkata:

“Kami masyarakat juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan, karena kami masyarakat tidak ingin perencanaan yang telah kami susun dari awal tidak sesuai dengan apa yang

kita harapkan, dan kami masyarakat juga melakukan pemantauan terhadap pembangunan yang dilakukan, jika ada pihak-pihak yang menyeleweng kami masyarakat sudah sepakat secara tegas melaporkan kepada pihak yang berwajib” (Wawancara Bapak Anto 23 Januari 2020).

Sehubungan dengan hal itu, ternyata bapak Edi juga mengatakan, berikut pertanyaan beliau:

“Iya kami, masyarakat disini juga melakukan pengawasan ataupun pemantauan terhadap pembangunan infrastruktur Desa di Desa Tarowang ini dek, khususnya memang terhadap program pembangunan desa ini, karena apabila ada yang tidak sesuai kami masyarakat disini langsung mengomentari dan mengkritisnya jika kami biarkan saja, takutnya ada penyelewengan”. (Wawancara Bapak Edi 23 Januari 2020).

Senada dengan hal diatas ternyata pertanyaan tersebut juga dipotang oleh Bapak Aslan, berikut pertanyaan beliau:

“Iya dek, memang disini masyarakat benar-benar melakukan pemantauan terhadap pembangunan infrastruktur Desa yang ada, semua masyarakat ikut terlibat dalam pelaksanaan, sehingga masyarakat kritis dalam melakukan pemantauan dan evaluasi”. (Wawancara Bapak Aslan 23 Januari 2020).

Ternyata setelah peneliti juga melakukan wawancara atau interview dengan Bapak Pendi, berikut pertanyaan beliau :

“Benar, kami disini sebagai masyarakat tidak mau hanya sebagai penonton, jadi kami juga melakukan pemantauan ketika pembangunan itu

dilakukan, tapi alhamdulillah disini pembangunan sudah bagus". (Wawancara Bapak Pendi 23 Januari 2020).

Berdasarkan hasil pemaparan diatas maka penulis melihat bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur Desa pembangunan kantor Desa, pembuatan talud, gorong-gorong dan infrastruktur yang berupa jalan yang diadakan oleh program pembangunan desa adalah, bahwa masyarakat juga terlibat dalam pemantauan dan evaluasi, dan masyarakat juga mengawasi dalam pembangunan infrastruktur desa tersebut, karena masyarakat ada penyelewengan atau ketidak sesuaian antara apa yang telah direncanakan dari awal.

4. Tercapainya Strategi Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Di Desa Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto

Salah satu keberhasilan pemerintah Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat di Desa Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto adalah meningkatnya partisipasi masyarakat, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan dari hasil Pemanfaatan Hasil Pembangunan Desa di Desa Tarowang.

Pemanfaatan hasil pembangunan merupakan wujud penerimaan masyarakat terhadap hasil pembangunan dengan asumsi apabila masyarakat bersedia untuk memanfaatkan suatu hasil pembagunan berarti masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung juga menerima hasil

pembangunan tersebut. Manfaat yang diperoleh masyarakat dari pembangunan infrastruktur baik berupa sarana dan prasarana tersebut adalah agar desa Tarowang memiliki suatu perubahan dengan adanya pembangunan yang tidak tertinggal seperti desa-desa yang lainnya. Hal ini lebih jauh lagi dari sekedar menerima dan memanfaatkan adalah dengan memelihara hasil pembangunan tersebut sebagai wujud dari kepedulian masyarakat terhadap hasil pembangunan tersebut. (Observasi, Tanggal 03 Desember 2019).

Sedangkan partisipasi pemeliharaan infrastruktur yang berupa sarana dan prasarana di Desa Tarowang dalam hal ini di serahkan kepada masing-masing masyarakat yang merasakan manfaat dari pembangunan yang telah terlaksana ini tidak adanya aturan yang mengikat dari Desa Tarowang didalam pengelolaan pemeliharaan sarana dan prasarana. Oleh sebab itu, untuk setiap warga masyarakat harus sadar akan pentingnya menjaga fasilitas yang sudah terpenuhi. Hal ini di tuturkan oleh Kepala Desa Tarowang menurutnya pada kegiatan pemeliharaan pembangunan ini tidak adanya aturan yang mengikat dari Desa Tarowang untuk memelihara bangunan yang sudah ada.

Dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pemanfaatan sangat penting karena masyarakat adalah tujuan utama dari setiap pembangunan maka masyarakat juga harus memelihara dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pemanfaatan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, dalam hal ini tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga hasil

pembangunan sudah nampak adanya walaupun pada tahap ini partisipasi dalam proses pemeliharaan, masyarakat hanya diharuskan dan tidak ada peraturan tertulis dan terikat dari Desa Tarowang sendiri yaitu dengan menjaga dan merawatnya dengan baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian lapangan dan setelah penulis menganalisa yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi masyarakat Desa Tarowang dapat dilihat pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan yang tergolong baik dalam partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan serta pemeliharaan.
2. Partisipasi masyarakat meningkatkan karena kesadaran untuk membangun desa telah tertanam dari dalam diri mereka untuk berkontribusi dalam pengelolaan ADD.
3. Sikap pemerintah desa yang transparan, akuntabel dalam memanfaatkan dana ADD.
4. Masyarakat kritis dalam mengawasi pelaksanaan ADD sehingga meminimalisir terjadinya penyelewengan dana ADD.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan saran yang kiranya dapat berguna bagi semua pihak.

1. Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan ADD perlu mendapat pengawasan dari pemerintah desa.

2. Tingkat Partisipasi masyarakat harus mengedepankan ikut serta dalam membantu pemerintah desa atau daerah agar pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, Kenneth R. 2005. *Konsep Strategi Perusahaan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Bungin, Burhan, 2007. *Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi Dimasyarakat)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Davis, Keith. 2000. *Perilaku Dalam Organisasi*, Edisi ketujuh. Jakarta: Erlangga.
- D.W.Nana. 1993. *Manajemen Pembangunan Prasarana Kota*. Jakarta: LP3S.
- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan (Cetakan Pertama)*. Yogyakarta: PT. Uhindo dan Offset.
- Handayani, Suci. 2006. *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi (Cetakan Pertama)*. Surakarta: Kompip Solo.
- Hariyono, Paulus. 2007. *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*. Jakarta: Bumi Askara
- Isbandi, Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas : Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: Fisip UI press.
- Mardalis. 2003. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Askara
- Meleong, J.2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, Matthew. B. dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih. 2008. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ndraha Taliziduhu. 2000. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta :PT Rineka Cipta.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta Rukmana.
- Press. Sugiyono . 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

- Siagian, SP. (2007) *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Setiady, Elly M. 2006. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Slamet, M. 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB
- Soetrisno, Loekman. 2000. *Memuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Supriady, Deddy dan Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: SUN
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isi Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang. UM Press.
- Sutarno. 2006. *Perpustakaan dan Masyarakat*. Jakarta: CV. Agung Seto. Yuwono,
- Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Semarang: Ciyapps Diponegoro University.
- Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*. Semarang : Ciyapps Diponegoro Universiti.





Penerimaan Mahasiswa untuk Pelaksanaan Penelitian oleh Kepala Desa Tarowang



Penandatanganan Persetujuan Pelaksanaan Penelitian oleh Kepala Desa Tarowang



Foto Bersama Kepala Desa Tarowang



**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK**

Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 34 Telp. (0419) 23024 Kode Pos 92311

Nomor : 02/Kesbangpol/1/2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Tarowang
Jeneponto

Di-
TEMPAT

Berdasarkan Surat dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Nomor 27/129.5.01/PTSP/2019 Perihal: Izin Penelitian Tanggal 31 Desember 2019, dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : IRWAN JAYA
Nomor Pokok : 103640183313
Tempat / Tgl lahir : Tarowang 27 November 1992
Jenis kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Tarowang

Bermaksud mengadakan penelitian di daerah /Instansi saudara dalam rangka penyusunan Skripsi /Penelitian/ Tesis/ Desertasi / Laporan dengan judul :

**" STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DESA TAROWANG KECAMATAN TAROWANG
KABUPATEN JENEPONTO "**

Untuk jangka waktu : 1 (satu) Bulan TMT: 3 Januari 2020 s/d 3 Februari 2020
Pengikut / Anggota : - Orang

Pada prinsipnya kami menyetujui penelitian diatas dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah penelitian harus melapor kepada Instansi yang bersangkutan;
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diberikan / izin semata-mata diberikan untuk keperluan ilmiah;
3. Mentaati semua ketentuan / Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan adat istiadat setempat ;
4. Menyerahkan satu berkas foto copy hasil penelitian / skripsi / tesis / desertasi / buku kepada Bupati Jeneponto Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jeneponto.

Jeneponto, 3 Januari 2020



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Jeneponto

/s/ H. SYID.BSW

Pembina
: 19620424198903 1 024

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Jeneponto (sebagai laporan) di Bontosunggu;
2. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Tamalatea Makassar di Makassar
3. Yang Bersangkutan;
4. Peritunggal

Surat Izin Melaksanakan Penelitian di Kabupaten Jeneponto



**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KECAMATAN TAROWANG
DESA TAROWANG**

Alamat : Jalan Pendidikan Dusun Bungang Camba Desa Tarowang

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 084 /KDT/1/2021

Assalamu Alikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : SAHARUDDIN
Jabatan : KEPALA DESA TAROWANG
Alamat : DUSUN TANAKEKE DESA TAROWANG

Dengan ini menerangkan Bahwa :
Nama : IRWAN JAYA
NIM : 105640183313
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Jurusan : SOSIAL DAN ILMU POLITIK

TELAH Melaksanakan Penelitian 03 Januari 2020 Sampai Dengan 03 Maret 2020 di Kantor Desa Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penyusunan tesis dengan judul "STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA TAROWANG KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO".

Demikian Surat Keterangan ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Tarowang, 27 Januari 2021



Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian di Desa Tarowang



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jalan Sultan Al-Aidid No. 299 Gedung Al-Iqra' L1.51 Makassar 90122
Telp. (0411) 909972, Faks. (0411) 905580

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Pimpinan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Irwani
Prodi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Antarab Batas
1	Bab 1	15%	15%
2	Bab 2	24%	24%
3	Bab 3	13%	15%
4	Bab 4	10%	10%
5	Bab 5	0%	5%

Dinyatakan telah **Lulus** sek pengat yang disahkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 08 Februari 2023

Pemeriksa,

Mengetahui,
Ketua Prodi

Nursaleh Hartanani, S.P., M.P.
NBM. 137.4095

Dr. Nuryanti Musatti, S.P., M.Si
NBM. 1031102

RIWAYAT HIDUP PENULIS



IRWAN JAYA Dilahirkan di Desa Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto pada tanggal 27 November 1992, penulis merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara, dari pasangan Ayahanda Mansyur, MT dan Ibunda HJ. Nuraeni.

Penulis pertama kali masuk pendidikan formal sekolah dasar pada tahun 1999 di SDN Inpres 130

Tarowang dan tamat pada tahun 2004, melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Batang dan tamat tahun 2008, penulis melanjutkan pendidikan kejenjang Madrasah Aliyah Tarowang dan tamat pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan pada Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai tahun 2021. Penulis Mendapatkan Gelar S.IP Jurusan Ilmu Pemerintahan dengan penelian yang berjudul Strategi Pemerintah desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, semoga dengan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan penulis dapat mengimplementasikan di masyarakat apa yang penulis dapatkan dari selama belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.